



DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



LAKIP 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun. Laporan ini pada khususnya menggambarkan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Dari hasil Evaluasi Kinerja, diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada 2023 dengan dukungan dana APBD **sebesar Rp. 19.715.394.003,-**

Dari anggaran yang tersedia tersebut dapat direalisasikan sebesar **Rp. 17.711.985.833,-** atau sebesar **89,84 %**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam upaya pengoptimalisasian kinerja sehingga sangat diperlukan koreksi / perbaikan dan penyempurnaan secara optimal dan menyeluruh pada kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepada pihak-pihak terutama kepada seluruh pejabat dan staf Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bekerjasama dalam pencapaian program kegiatan yang dilakukan tahun 2023, kami tak lupa menyampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian didalam meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme dibidang tugas masing-masing.

Palu, 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

**Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
SISTIMATIKA PENULISAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Cascading Kinerja	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
1.3. Isu-Isu Strategis	12
1.4. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana	13
1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 ...	15
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 17
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	17
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	19
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan 2023	24
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 27
3.1. Capaian Kinerja	27
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	27
b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023.....	28
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pariwisata	32
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	32
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.....	33
f. Analisis efisiensi sumber daya dan realisasi anggaran.....	35
g. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	37
3.2. Realisasi Anggaran	38
3.3. Penghargaan	40
 BAB IV PENUTUP	 41
4.1. Kesimpulan	41
4.2. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja	41

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH 2023

Disusun oleh :
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Dewi Sartika No.45 Palu 94121
Telp. 0451 483942 Fax. 483941
Email : sulteng.pariwisata@gmail.com
Website : www.disparekrafslteng.com

SISTIMATIKA PENULISAN

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas keadaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023.

Bab II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan Visi dan Misi serta muatan rencana strategis/kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 merupakan presentasi hasil pelaksanaan tugas selama 1 (tahun) yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menyajikan seluruh capaian kinerja dari semua sasaran dan kegiatan selama tahun 2023. Penilaian capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan target atau rencana kerja dengan realisasinya dari indikator kinerja input, output dan outcomes.

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, yang sangat ditekankan adalah kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan program pembangunan berbasis kinerja yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan 4 (empat) Indikator Kinerja adalah : Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian nilai 74,37, Nilai Tambah Sektor Pariwisata dengan capaian Rp. 1.228.210.200.000, Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dengan capaian 5.139.979 orang dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif dengan capaian Rp.103.981.200.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di kategorikan tinggi.

Capaian Kinerja selama tahun 2023 adalah wujud dari keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan Pariwisata. Program yang telah dicapai di tahun 2023 ini adalah (1). Peningkatan Daya Tarik Wisata, (2). Pemasaran Pariwisata, (3). Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, (4). Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, (5). Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Harapan kami dengan selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah Sulawesi Tengah, khususnya dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada masa kini dan masa akan datang.

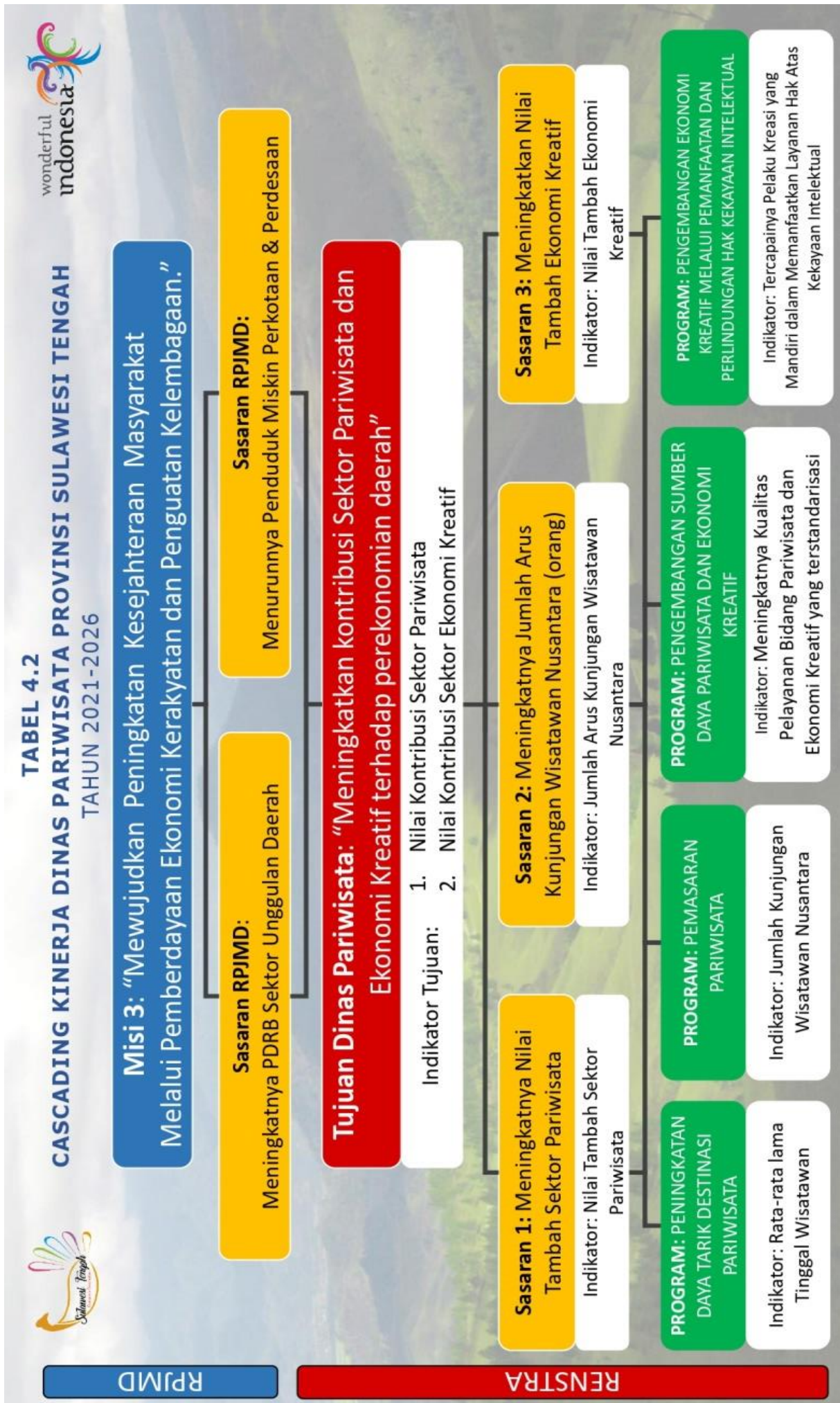
Palu, 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

**Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006**

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja





PROGRAM: PEMASARAN PARIWISATA

KEGIATAN: PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI, DAYA TARIK DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI

Indikator: Jumlah Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

5 Sub-kegiatan

Sub-Kegiatan: Penguatan Promosi Melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri

Indikator: Jumlah Dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri

Sub-Kegiatan: Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri

Indikator: Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri

Sub-Kegiatan: Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik dalam dan luar negeri

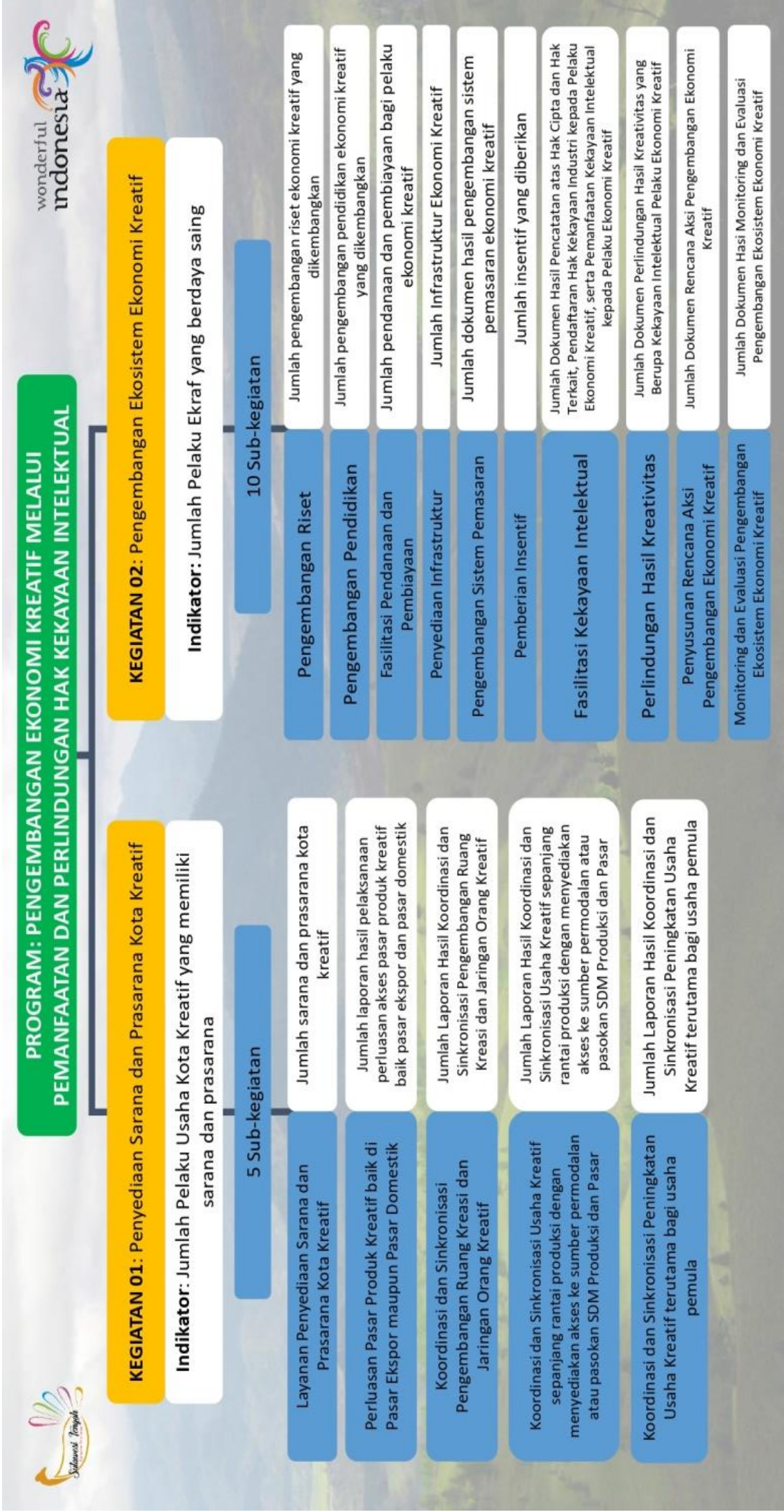
Indikator: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri

Sub-Kegiatan: Peningkatan Kerjasama dan kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri

Indikator: Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri

Sub-Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Indikator: Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata





1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; .
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

- **Kepala Dinas**

- **Sekretaris**

1. Sub Bagian Keuangan dan Asset
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

- Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- UPT.Dinas

b. Tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang

1. SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas dikepalai oleh seorang pejabat Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
3. Penyiapan bahan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum.
4. Pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga, Korpri dan umum.
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Bidang Pengembangan Destinasi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya tarik dan Pengembangan Kawasan Pariwisata. Untuk

menyelenggarakan tugasnya, kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata.
2. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan Destinasi pariwisata, melaksanakan kajian/penelitian pengembangan Destinasi pariwisata dan penerbitan perizinan berusaha berbasis pariwisata.
4. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan kawasan pariwisata, koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kawasan pariwisata, melaksanakan kegiatan teknis pengembangan kawasan pariwisata meliputi pembinaan dan penataan kawasan pariwisata unggulan dan prioritas Provinsi.
5. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan pengembangan sadar wisata dan kerja sama antar lembaga dan masyarakat serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri, melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan teknis peningkatan pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata dalam upaya pengembangan destinasi dan kawasan wisata.
6. Penyiapan bahan kerja sama bagi pengembangan Destinasi pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.
7. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan Destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata peningkatan daya tarik wisata.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata.

2. BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Bidang Pemasaran Pariwisata dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
2. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang penguatan promosi, penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan Penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
5. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Penguatan promosi, Penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
6. Pelaksanaan penyelenggaraan penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan berdasarkan program dan kebijakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata.
7. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

9. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

3. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan Bidang Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
2. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan Ekonomi Kreatif.
6. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif.
7. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya sektor ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak Kekayaan Intelektual.
8. Penyiapan bahan dan data untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

9. Penyiapan bahan rumusan dan kebijakan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kota kreatif, ruang kreatif, dan jaringan orang kreatif.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
11. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

4. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
6. Pemberian bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan supervisi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

8. Melaksanakan program pelatihan dan skema uji kompetensi di bidang pengembangan standar kompetensi dan kerangka kualifikasi bidang Pariwisata.
9. Memfasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi bidang Pariwisata, pembentukan Badan Promosi Daerah dan kerjasama antar lembaga Pariwisata dan lembaga lainnya dalam program penguatan Sumber Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Pengembangan standar dan peningkatan Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif.
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
12. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1.3. Isu - Isu Strategis

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada dan telaahan visi dan misi pembangunan pariwisata, sasaran jangka menengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan OPD Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek implikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal-hal penting yang akan menjadi agenda Prioritas dalam Pembangunan Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah.

Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Perbaikan/revitalisasi sarana prasarana di destinasi wisata yang terdampak bencana alam.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam peruntukan pariwisata yang belum optimal.
3. Pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata untuk pembentukan kawasan strategis pariwisata provinsi.
4. Perlunya penyusunan berbagai penelitian dan kajian tentang potensi pariwisata daerah.
5. Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan.
6. Perlunya koordinasi terpadu lintas sektoral untuk Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan dapat merumuskan rencana aksi dan tindak lanjut

untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah.

- 7. Pengembangan Daya Saing Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.
- 8. Pentingnya mendorong para pelaku Ekraf untuk dapat memanfaatkan layanan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 9. Peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur bidang pariwisata, mitra usaha pariwisata, tenaga kerja pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 10. Pembuatan paket wisata dan peningkatan promosi pemasaran pariwisata yang berbasis digital.
- 11. Peningkatan kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata, baik antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku industri pariwisata di sektor swasta.
- 12. Koordinasi dan sinkronisasi data-data kepariwisataan antar bidang maupun lintas sektoral.

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana

1.4.a Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam Penyelenggaraan TUPOKSI Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan kondisi kepegawaian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah Serta Susunan Personil Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Golongan Per 31 Desember 2023

PEGAWAI	JUMLAH
Golongan IV	13 Orang
Golongan III	40 Orang
Golongan II	4 Orang
Jumlah	57 Orang

**Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
Sesuai Jabatan Per 31 Desember 2023**

Pegawai	Jumlah	
Eselon II	1	Orang
Eselon III	5	Orang
Eselon IV	2	Orang
Fungsional	10	Orang
Pelaksana	39	Orang
Jumlah	57	Orang

**Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2023**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
S2	18	Orang
S1	29	Orang
Sarjana Muda/D3	2	Orang
S L T A	8	Orang
Jumlah	57	Orang

1.4.b. Aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka ketersediaan Sumber Daya Manusia (*human resources*), sarana dan prasarana penunjang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Adapun nilai asset tetap berupa sarana dan prasarana bagi aparaturn Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Neraca Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tanah	Rp. 11.180.480.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 5.287.256.647,-
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 37.507.350.605,06
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 2.122.800.111,10
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 229.650.000,-
6.	Aset Lainnya	Rp. 8.672.654.750,-
	Total	Rp. 65.000.192.113,16

1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan nilai capaian sebesar **81** yang membuahkan penghargaan sebagai salah satu OPD yang berhasil mendapat Nilai SAKIP A dan mendapat reward atas hasil penilaian dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik yaitu akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal yang meliputi 5 komponen penilaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 22,5
2. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 27,3
3. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,45
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,75

Dari hasil evaluasi tersebut, masih terdapat permasalahan yang harus ditindak lanjuti dengan melakukan beberapa perbaikan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

No.	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
1.	Meningkatkan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja serta memanfaatkan hasil evaluasi Rencana Aksi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata;	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
2.	Mengoptimalkan informasi tentang capaian kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja dengan cara : - Mengungkapkan informasi seluruh capaian indikator kinerja instansi, bukan hanya terbatas pada Indikator Kinerja Utama (IKU) - Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark Kinerja) - Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	Akan melengkapi informasi capaian seluruh indikator program/kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan sesuai IKU Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja OPD.
3.	Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKI) berdasarkan pedoman teknis dan standar yang telah disusun dan dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Melakukan monitoring dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKI) yang sesuai dengan pedoman teknis dan standar yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan strategis Dinas Pariwisata adalah Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah. Tujuan ini menunjukkan suatu kondisi yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang akan mengarahkan perumusan sasaran, program serta kegiatan dalam rangka merealisasikan **Misi 3 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.**

Sedangkan **Sasaran strategis meliputi meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata, meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara dan meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif.** Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran di rumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapain sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk di wujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Adapun yang menjadi **Indikator Kinerja Dinas Pariwisata adalah Nilai Tambah Sektor Pariwisata, Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif.** Indikator Kinerja mempunyai tujuan dan sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan (*suistenable*) dan memiliki ukuran secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan kepariwisataan adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Swasta dan seluruh Masyarakat. Keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh adanya kerjasama dan keterpaduan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga harus dilakukan secara terintegrasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata Sulawesi Tengah diperlukan langkah-langkah strategis dan arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah Sulawesi Tengah sesuai uraian dibawah ini.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Meningkatkan kapasitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata 2. Meningkatkan pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata 4. Meningkatkan pengembangan usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota
Meningkatkan Pemasaran Pariwisata	1. Mengembangkan dan memperluas jaringan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri 1. Mempromosikan potensi Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Meningkatkan kapasitas sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Meningkatkan pelatihan dan pendampingan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif 2. Meningkatkan pembinaan usaha ekonomi kreatif

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO.	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SEBELUM		SESUDAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
			PERUBAHAN		PERUBAHAN		BERKURANG	
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp	1.111.008.000	Rp	1.458.272.335	Rp	347.264.335
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp	440.264.089	Rp	593.538.839	Rp	153.274.750
		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rp	88.880.089	Rp	99.153.589	Rp	10.273.500
		Perencanaan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rp	117.390.000	Rp	151.080.000	Rp	33.690.000
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rp	183.994.000	Rp	183.994.000	Rp	-
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DTW Unggulan Provinsi	Rp	50.000.000	Rp	159.311.250	Rp	109.311.250
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp	293.732.411	Rp	293.732.411	Rp	-
		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp	38.770.911	Rp	38.770.911	Rp	-
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp	130.224.000	Rp	130.224.000	Rp	-
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp	50.130.000	Rp	50.130.000	Rp	-
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp	74.607.500	Rp	74.607.500	Rp	-
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp	328.974.000	Rp	522.963.585	Rp	193.989.585
		Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp	-	Rp	17.767.000	Rp	17.767.000
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp	105.630.000	Rp	275.728.000	Rp	170.098.000
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp	46.094.000	Rp	46.094.000	Rp	-
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp	177.250.000	Rp	176.770.585	-Rp	479.415

NO.	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM		SESUDAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
			PERUBAHAN		PERUBAHAN		PERUBAHAN	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Provinsi	Rp	-	Rp	6.604.000	Rp	6.604.000
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Rp	48.037.500	Rp	48.037.500	Rp	-
		Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Rp	48.037.500	Rp	48.037.500	Rp	-
2.	Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantera (orang)	PEMASARAN PARIWISATA	Rp	1.696.185.000	Rp	3.230.911.200	Rp	1.534.726.200
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp	1.696.185.000	Rp	3.230.911.200	Rp	1.534.726.200
		Penguatan Promosi Melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Rp	170.000.000	Rp	170.000.000	Rp	-
		Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Rp	843.420.000	Rp	2.341.997.200	Rp	1.498.577.200
		Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik dalam dan luar negeri	Rp	171.580.000	Rp	207.729.000	Rp	36.149.000
		Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri	Rp	511.185.000	Rp	511.185.000	Rp	-
3.	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	Rp	1.802.000.000	Rp	1.612.529.429	-Rp	189.470.571
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp	1.604.000.000	Rp	1.239.095.100	-Rp	364.904.900
		Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp	1.300.000.000	Rp	810.631.100	-Rp	489.368.900

NO.	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/
			PERUBAHAN	PERUBAHAN	BERKURANG
		Perluasan Pasar Produk Kreatif baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Rp 130.801.000	Rp 291.440.000	Rp 160.639.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Rp 70.000.000	Rp 34.525.000	-Rp 35.475.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula	Rp 103.199.000	Rp 102.499.000	-Rp 700.000
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp 198.000.000	Rp 373.434.329	Rp 175.434.329
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Rp 101.865.500	Rp 277.965.500	Rp 176.100.000
		Perlindungan Hasil Kreatifitas	Rp 96.134.500	Rp 95.468.829	-Rp 665.671
		J U M L A H	Rp 4.609.193.000	Rp 6.301.712.964	Rp 1.692.519.964

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM		SESUDAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		PERUBAHAN		PERUBAHAN		BERKURANG	
1	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp	689.999.976	Rp	988.475.976	Rp	298.476.000
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp	689.999.976	Rp	988.475.976	Rp	298.476.000
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp	254.954.100	Rp	383.153.200	Rp	128.199.100
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Rp	318.056.028	Rp	331.110.350	Rp	13.054.322
	Pelatihan berbasis kompetensi bidang Homestay dan Pemandu wisata (Tour Guide) tingkat Lanjutan	Rp	116.989.848	Rp	274.212.426	Rp	157.222.578
2	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp	11.310.851.027	Rp	12.425.205.063	Rp	1.114.354.036
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	669.590.375	Rp	838.968.962	Rp	169.378.587
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	669.590.375	Rp	838.968.962	Rp	169.378.587
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	9.127.489.975	Rp	9.433.429.975	Rp	305.940.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	7.476.694.003	Rp	7.776.734.003	Rp	300.040.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	1.581.082.000	Rp	1.590.682.000	Rp	9.600.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	69.713.972	Rp	66.013.972	-Rp	3.700.000
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp	193.127.662	Rp	240.362.662	Rp	47.235.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	193.127.662	Rp	240.362.662	Rp	47.235.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	7.855.800	Rp	26.630.800	Rp	18.775.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	7.855.800	Rp	26.630.800	Rp	18.775.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	190.704.235	Rp	233.783.335	Rp	43.079.100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	11.630.785	Rp	19.338.620	Rp	7.707.835
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	71.557.260	Rp	83.362.550	Rp	11.805.290

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 25.426.190	Rp 48.992.165	Rp 23.565.975
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 82.090.000	Rp 82.090.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 37.647.551	Rp 104.584.885	Rp 66.937.334
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 37.647.551	Rp 104.584.885	Rp 66.937.334
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 552.615.437	Rp 915.776.237	Rp 363.160.800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 243.546.137	Rp 247.126.137	Rp 3.580.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 309.069.300	Rp 668.650.100	Rp 359.580.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 531.819.992	Rp 631.668.207	Rp 99.848.215
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 302.000.000	Rp 324.459.750	Rp 22.459.750
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 23.671.535	Rp 36.210.000	Rp 12.538.465
	Pemeliharaan/Renabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 206.148.457	Rp 270.998.457	Rp 64.850.000
	J U M L A H	Rp 12.000.851.003	Rp 13.413.681.039	Rp 1.412.830.036

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan x biaya belanja x lama tinggal	Analisis Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2023 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	- Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara Tahun n	Analisis Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2023 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	- Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Output_{kt} = Produksi_{kt} x Harga_{kt} $NTB = \sum (\text{output-konsumsi antara})$	Data Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Sulawesi Tengah Tahun 2023	- Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur seperti yang dapat dilihat pada lampiran berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**

Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2023

Pihak Kedua,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680825 199412 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	60
2	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata (Triliun, Rupiah)	1,1
3	Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan (Orang)	1.323.098
4	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Miliar, Rupiah)	55

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.12.425.205.063	APBD
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.1.458.272.335	APBD
3	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.3.230.911.200	APBD
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp.1.612.529.429	APBD
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp .988.475.976	APBD

Palu, November 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680825 199412 2 006

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 2023

3.1 A. Capaian Kinerja

Secara umum, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam memenuhi tugas dan fungsi yang harus diwujudkan tahun 2023 maka ditetapkan dalam 3 sasaran dan 3 indikator. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran. Langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi untuk masing-masing komponen sasaran sehingga diperoleh capaian tiap komponen dengan rata-rata seluruh sasaran. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal dan internal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.A Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Rp. 1.100.000.000.000.-	Rp.1.228.210.200.000,-	112 %	Tinggi
2.	Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	1.323.098 orang	5.139.979 orang	388 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp. 55.000.000.000,-	Rp. 103.981.200.000,-	189 %	Tinggi

Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk masing-masing sasaran tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi kerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 3 indikator yaitu **Nilai Tambah Sektor Pariwisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif**. Untuk Indikator Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif adalah indikator yang baru mulai dilaksanakan pada Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2021-2026.

Realisasi capaian kinerja pada indikator Nilai Tambah Sektor Pariwisata pada tahun 2022 adalah sebesar 0,02 %. Kemudian pada tahun 2023, satuan indikatornya dirubah dari persentase menjadi nilai rupiah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Adapun realisasi capaian kinerja Nilai Tambah Sektor Pariwisata Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.228.210.200.000,-

Pada indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara perkembangannya dapat dilihat pada tingkat kunjungan wisatawan nusantara ke Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cukup fluktuatif. Tahun 2019 adalah masa-masa pemulihan akibat dampak dari adanya bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, namun tidak menyurutkan keinginan wisatawan untuk berkunjung ke Sulawesi Tengah baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan Mancanegara. Hal ini terlihat dari capaian kunjungan yang diperoleh dari wisatawan Nusantara sebanyak 3.090,171 orang atau sebesar 86 %

Namun kemudian di tahun 2020 sektor pariwisata kembali mengalami dampak penurunan yang sangat signifikan akibat merebak dan menyebarnya pandemi virus corona (covid 19) yang melanda dunia. Kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 1.812.995 orang atau sebesar 47,7 jauh mengalami penyusutan dan ini terjadi secara global, di seluruh dunia. Mobilitas masyarakat yang terbatas dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di dalam negeri serta penutupan berbagai tempat rekreasi dan wisata sebagai bentuk antisipasi penyebaran pandemi, berimbas besar terhadap

perputaran roda ekonomi, termasuk juga pada pengurangan tenaga kerja di sektor pariwisata. Keadaan ini masih tetap berlanjut hingga ke Tahun 2021, dimana jumlah kunjungan wisatawan Nusantara mencapai jumlah 555.235 atau sebesar 77,8%.

Selanjutnya di tahun 2022, kunjungan wisatawan Nusantara semakin mengalami peningkatan, sebagai dampak dari adanya kebijakan Pemerintah yang memberi keleluasaan untuk melakukan perjalanan wisata tetapi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat diantaranya dengan persyaratan wajib vaksin covid-19 sebanyak 3 tahap dan menerapkan protokol CHSE yakni Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan) dan Environment Sustainability (kelestarian lingkungan), sehingga dapat mencapai jumlah kunjungan sebanyak 1.317.958 atau sebesar 92,34% sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk Tahun 2023, capaian jumlah kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 5.139.979 orang atau meningkat sebesar 290 % sangat jauh melampaui capaian tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara ini selain disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah tentang pemberlakuan perjalanan wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan persyaratan wajib vaksin covid-19 sebanyak 3 tahap, juga karena diperkuat lagi dengan adanya himbauan dari Pemerintah yang memotivasi masyarakat agar mau berwisata di dalam negeri saja, salah satunya melalui publikasi di media sosial dengan hastag #ayoberwisata dan #diindonesiaaja. Hal ini membuat pariwisata Indonesia dapat bangkit kembali yang tentunya turut berdampak pada sektor ekonomi kreatif, berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat yang diperoleh dari kunjungan wisatawan Nusantara.

Kemudian sama halnya seperti indikator Nilai Tambah Sektor Pariwisata yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk indikator Nilai Tambah Ekonomi Kreatif adalah indikator yang baru mulai dilaksanakan pada Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2021-2026.

Realisasi capaian kinerja pada indikator Nilai Tambah Ekonomi Kreatif pada tahun 2022 adalah sebesar 0,05 %. Kemudian pada tahun

2023, satuan indikatornya dirubah dari persentase menjadi nilai rupiah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Adapun realisasi capaian kinerja Nilai Tambah Sektor Pariwisata Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 103.981.200.000,- Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 - 2023

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	-	-	-	0,02	0,02	100	1.100.000.000.000	1.228.210.200.000	112
2.	Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	4.000.000	713.618	18	1.427.237	1.317.958	92	1.323.098	5.123.734	387
3.	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	-	-	-	0,05	0,05	100	55.000.000.000	Rp 103.981.200.000	189

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pariwisata dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

3.1.C Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Rp. 1.228.210.200.000,-	0,51 %	
2.	Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	5.139.979	2.336.689	220 %
3.	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp. 103.981.200.000,-	0,35 %	

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Pada Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang sama dengan yaitu Indikator Kinerja Nilai Tambah Ekonomi Kreatif, sehingga capaian kinerjanya dapat dibuat perbandingan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Standar Nasional 2023	% Capaian
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp. 103.981.200.000,-	Rp.1.564.000.000.000,-	6,60 %

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2023 ini melebihi hingga 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja yang secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksud antara lain:

- Posisi Sulawesi Tengah yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur.
- Posisi Sulawesi Tengah sangat strategis karena diapit oleh 2 Daerah yang mempunyai Destinasi Wisata Super Prioritas yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
- Potensi sumber daya alam dan budaya yang sangat beragam dan memadai untuk pengembangan sektor kepariwisataan.
- Bertambahnya jumlah usaha wisata karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk berinvestasi di bidang pariwisata.
- Pemerintah Daerah mendorong terciptanya kreasi dan kreatifitas masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomiannya, dengan melaksanakan berbagai pelatihan ketrampilan usaha.
- Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendorong pengembangan pariwisata di daerah Sulawesi Tengah.
- Adanya kerjasama yang baik di bidang promosi pariwisata antara pemerintah, pemerintah daerah dan swasta yang semakin meningkat.
- Pengembangan potensi wisata Geowisata, Geopark dan Cagar Biosfer.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksud antara lain :

- Adanya komitmen pemerintah menjadikan Sektor Pariwisata sebagai salah satu sumber utama devisa negara.
- Kondisi keamanan daerah Sulawesi Tengah semakin kondusif dan terbukanya peluang berinvestasi di sektor pariwisata.
- Meningkatnya kembali minat masyarakat internasional untuk mengadakan perjalanan wisata, setelah pandemic covid-19 mereda.

- Adanya objek wisata unggulan yang memiliki daya tarik dan keunikan serta banyaknya bermunculan destinasi wisata baru.
- Meningkatnya minat masyarakat melewati weekend ataupun long weekend untuk staycation di hotel, penginapan maupun di destinasi wisata.
- Kondisi pemerintahan yang semakin stabil, sehingga memberikan peluang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- Kualitas kemampuan SDM profesional bidang pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang belum optimal.

Solusi : Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 2023 telah dilaksanakan berbagai jenis kegiatan peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di beberapa Kabupaten/Kota antara lain : Pelatihan Service Excellence & Hospitality, Pelatihan Inkubator Ekraf Lokal, Pelatihan Pemandu Wisata Gunung, Pelatihan Pengelola Homestay, Peningkatan kapasitas SDM bidang Hotel dan Restoran, Pemberdayaan Kelompok Usaha Fotografi. Selain itu, untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga telah dilaksanakan kegiatan Studi Tiru Pendampingan Ekonomi Kreatif ke Provinsi Yogyakarta dan Studi Tiru Pengelolaan Wisata Geopark ke Jawa Barat.

- Data base pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung proses pengambilan keputusan untuk pengembangan sektor pariwisata.

Solusi :Sebagai salah satu alternative solusinya adalah dengan menyediakan data potensi pariwisata. Tahun 2023 telah dilaksanakan pembuatan Masterplan Desa Wisata Malangga, penyusunan Kajian Wisata Pulau Sombori, penyusunan buku Potensi Kawasan Pariwisata Negeri Seribu Megalit.

- Promosi dan pemasaran produk pariwisata belum terlaksana secara optimal dan terpadu di antara pihak yang terkait.
Solusi : Untuk mendukung perluasan promosi dan pemasaran produk pariwisata tersebut, pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata antara lain Video Wisata Underwater Donggala, Video Wisata Underwater Kepulauan Togean, Video Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit. Untuk kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata telah dilaksanakan kegiatan Travel Fair Pariwisata, Festival Musik, juga dukungan untuk beberapa event pariwisata di Kabupaten/Kota antara lain Festival Haul Guru Tua, Festival Kampung Baru Fair, Festival Tangga Banggo, Festival Pandapa Posalia Besusu, Festival Danau Lindu, Sport Tourism (Trail, Run and Fun Bike), Jelajah Togean. Selain itu Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah juga turut berpartisipasi dalam beberapa event promosi dan pemasaran pariwisata di dalam negeri yaitu di Expo Pariwisata dan Ekraf Nusantara di Jawa Timur, Pameran Deep & Extreme Indonesia (DXI) di Jakarta, Pameran International Tourism Investment Forum (ITIF) di Bali. Juga mengikuti promosi dan pemasaran pariwisata terbesar di dunia yaitu pada pameran Internationale Tourismus Borse (ITB) Berlin Jerman.

F. Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

3.1.E Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			% Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	1.100.000.000.000	1.228.210.200.000	112	Rp 1.458.272.335	Rp 1.434.492.609	98	14
2.	Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	1.323.098	5.139.979	267	Rp 3.230.911.200	Rp 3.207.077.800	99	168
3.	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	55.000.000.000	Rp 103.981.200.000	189	Rp 2.601.005.405	Rp 2.510.539.095	97	92
4.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	60	74,37	124	Rp 12.425.205.063	Rp 10.559.876.329	85	27

G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 5 program dan 16 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.458.272.335.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.434.492.609,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,7 %, yang diarahkan untuk 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.230.911.200.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.207.077.800,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,26 %, yang diarahkan untuk 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.612.529.429.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.537.658.750,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,36 %, yang diarahkan untuk 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 988.475.976.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 972.880.345,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,42 %, yang diarahkan untuk 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.425.205.063.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 10.559.876.329,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 84,99 %, yang diarahkan untuk 8 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

3.2. Realisasi Anggaran

Dinas Pariwisata di tahun anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran dana sebesar **Rp. 19.715.394.003,-** yang kemudian dapat terserap sebesar **Rp. 17.711.985.833,- (89,84 %)** diantaranya ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung realisasi anggaran. Dari capaian realisasi anggaran tersebut terdapat deviasi sebesar **10,16 %** yang berasal dari **siswa Gaji sebesar 9,12 %** dan **1,04% dari sisa-sisa belanja kegiatan**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG REALISASI ANGGARAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Meningkatkan kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah	1. Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata	1.100.000.000.000	1.228.210.200.000	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 1.458.272.335	Rp 1.434.492.609	98,37	
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp 593.538.839	Rp 589.044.069		
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 293.732.411	Rp 291.055.380		
		2. Meningkatkan Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	1.926.769	5.139.979	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 522.963.585	Rp 506.863.360		
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 48.037.500	Rp 47.529.800		
					PEMASARAN PARIWISATA	Rp 3.230.911.200	Rp 3.207.077.800	99,26	
		3. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	55.000.000.000	103.981.200.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 3.230.911.200	Rp 3.207.077.800		
					PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp 1.612.529.429	Rp 1.537.658.750	95,36	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp 1.239.095.100	Rp 1.169.649.199		
					Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp 373.434.329	Rp 368.009.551		
2	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1. Capaian realisasi anggaran 2. Nilai SAKIP Dinas Pariwisata 3. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	89,84%	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 988.475.976	Rp 972.880.345	98,42	
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp 988.475.976	Rp 972.880.345		
					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 12.425.205.063	Rp 10.559.876.329	84,99	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 838.968.962	Rp 832.462.886		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.433.429.975	Rp 7.606.098.593		
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 240.362.662	Rp 221.711.818		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 26.630.800	Rp 26.577.500		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 233.783.335	Rp 233.406.507		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 104.584.885	Rp 104.572.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 915.776.237	Rp 914.815.503		
					JUMLAH		Rp 19.715.394.003	Rp 17.711.985.833	89,84

3.3 Penghargaan

Prestasi dan anugerah penghargaan yang diperoleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 adalah **“Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (ABBWI)”** dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menduduki peringkat ke 2 di kawasan Sulawesi, Maluku, Papua (SULAMPUA) sebagai Provinsi yang berhasil mencapai tingkat kunjungan pergerakan Wisatawan Nusantara dengan capaian 4,9 juta atau 90% dari target 5,5 juta perjalanan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Secara umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Adapun rumusan tujuan sasaran strategis pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yakni :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktifitas sektor unggulan daerah
 - Meningkatnya PDRB sektor unggulan daerah
2. Menurunkan kemiskinan
 - Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan

Tujuan Sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, seluruhnya telah selesai dilaksanakan dan telah berhasil dengan baik dengan capaian kinerja 89,84 %. Proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pencapaian kinerja, dari 4 program dan 8 kegiatan yang ditetapkan, semua telah mencapai kinerja sasaran yang diharapkan. Dari capaian tersebut, sudah sesuai dengan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian program ini adalah pada tingkat hasil (Outcome). Organisasi telah dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran baik program maupun kegiatan.

B. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang dicapai serta agar lebih efektif pelaksanaan kegiatan yang berhubungan pada pencapaian sasaran dan strategis maka di rekomendasikan beberapa hal antara lain :

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja Aparatur maka diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap sesuai kondisi anggaran yang dimiliki;
2. Perlunya pengembangan destinasi dan pembangunan sarana prasarana pariwisata yang dimiliki kabupaten/kota dengan memperhatikan kemampuan anggaran;
3. Penentuan target indikator pada semua tataran agar ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana final yang telah ditetapkan sehingga tidak menyulitkan dalam pencapaian indikator;
4. Untuk program kegiatan yang dibiayai oleh pusat (APBN/Tugas Pembantuan) agar dilakukan koordinasi baik ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun ditingkat Pusat agar sinkronisasi anggaran program dengan APBD dapat direncanakan sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan bersama.

**Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah**

**Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199403 2 006**

